

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Renstra BAPPEDA DIY memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan BAPPEDA DIY, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja BAPPEDA DIY yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY, serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja). Sehubungan dengan adanya penajaman dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan kegiatan yang dituangkan dalam meta program perlu dilakukan perubahan renstra tahun 2017-2022.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra BAPPEDA DIY. Semoga dokumen Renstra BAPPEDA DIY yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Oktober 2018

Kepala BAPPEDA DIY



Tavip Agus Rayanto

NIP. 19641107 199103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-3
1.3 Maksud Dan Tujuan	1-5
1.4 Sistematika Penulisan	1-5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY.....	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA DIY	2-1
2.2 Sumber Daya BAPPEDA DIY	2-3
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-20
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3-2	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BAPPEDA KAB/KOTA.....	3-11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-13
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	3-17
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA DIY	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi Dan Kebijakan	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1.	JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA DIY BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	2-5
TABEL 2-2.	JUMLAH ASET BERDASARKAN JENIS PADA BAPPEDA DIY TAHUN 2017	2-6
TABEL 2-3.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DIY	2-12
TABEL 2-4.	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DIY. 2-18	
TABEL 3-1.	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	3-1
TABEL 3-2.	TUJUAN DAN SASARAN PEMDA DIY 2017-2022.....	3-7
TABEL 3-3.	KETERKAITAN VISI, MISI KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA.....	3-8
TABEL 3-4.	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN BAPPEDA	3-10
TABEL 3-5.	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA DIY BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA	3-11
TABEL 3-6.	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA DIY BERDASARKAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA DI DIY BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA	3-12
TABEL 3-7.	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG TERKAIT PELAYANAN BAPPEDA DIY DITINJAU DARI IMPLIKASI RTRW DAN KLHS	3-17
TABEL 3-8.	RUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS.....	3-20
TABEL 4-1.	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN BAPPEDA DIY TAHUN 2017-2022	4-2
TABEL 4-2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	4-2
TABEL 5-1.	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS	5-1
TABEL 5-2.	TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5-5
TABEL 6-1.	MATRIKS META PROGRAM	6-3
TABEL 6-2.	PERUBAHAN KEGIATAN BAPPEDA DIY PASCA PENAJAMAN KEGIATAN META PROGRAM	6-4
TABEL 6-4.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DIY ...	6-9
TABEL 7-1.	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	7-1

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD	1-2
GAMBAR 2.	POSISI RENSTRA PERANGKAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	1-2
GAMBAR 3.	STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DIY.....	2-2
GAMBAR 4.	GRAFIK PEJABAT STRUKTURAL BERDASAR JENIS KELAMIN	2-3
GAMBAR 5.	KEBUTUHAN PEGAWAI BAPPEDA DIY	2-4
GAMBAR 6.	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	2-5
GAMBAR 7.	APLIKASI PERENCANAAN JOGJA PLAN	2-7
GAMBAR 8.	WEBSITE SISTEM INFORMASI PERENCANAAN RUANG	2-7
GAMBAR 9.	APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI PEMDA DIY.....	2-8
GAMBAR 10.	WEBSITE META DATA SPASIAL DAERAH.....	2-9
GAMBAR 11.	APLIKASI PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAERAH	2-9
GAMBAR 12.	KERANGKA LOGIS META PROGRAM BERDASAR RPJMD DIY 2017-2022.....	6-2

BAB 1

PENDAHULUAN

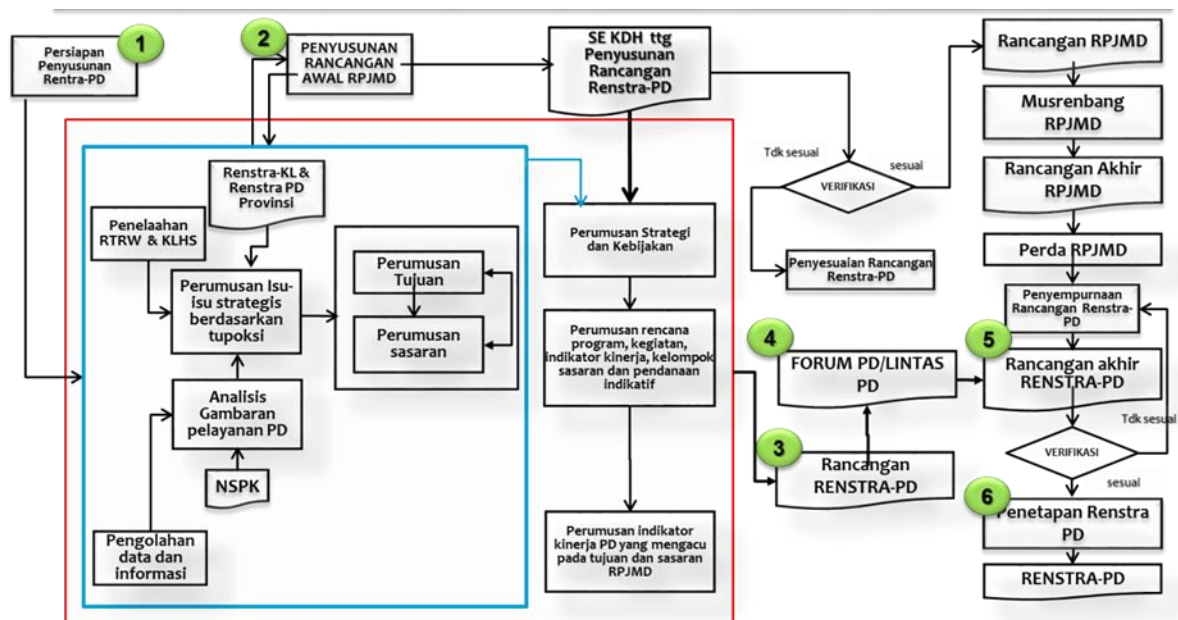
1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

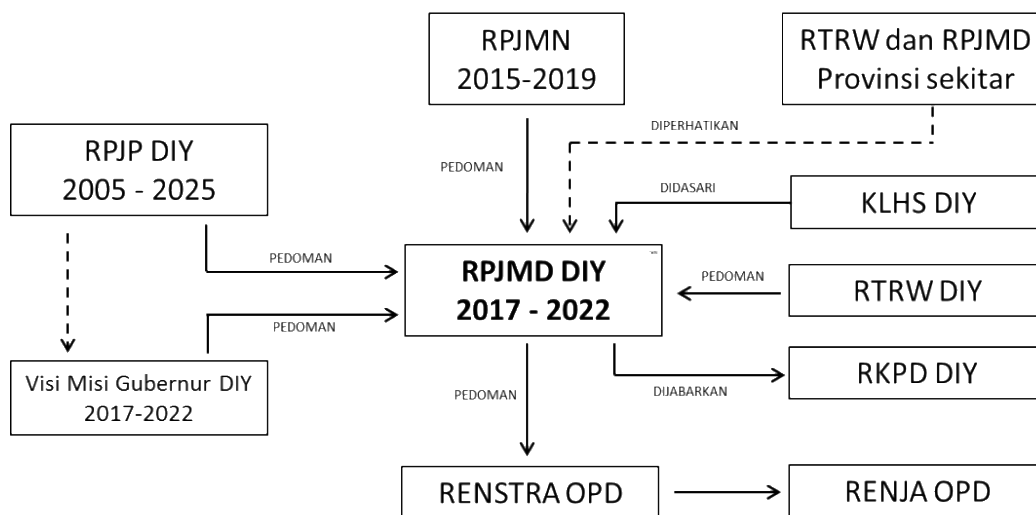
Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra BAPPEDA DIY disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 Nomor 67/DPRD/2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan

adanya perbaikan dan penajaman kegiatan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan. Nota kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD (343 ayat 2), bahwa perubahan tersebut akibat terdapat kebijakan provinsi (343 ayat 3) dan perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (343 ayat 9).

Perubahan Renstra Bappeda DIY Tahun 2017-2022 merunut pada ketentuan tersebut. Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 memiliki fokus pada perbaikan dan penajaman kegiatan dengan menggunakan meta program. Meta program merupakan matriks yang dapat mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda DIY) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Gubernur, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis *cascading* RPJMD DIY 2017-2022. Proses penyusunan meta program dalam rangka penajaman kegiatan berdampak pada perubahan nomenklatur kegiatan dan diikuti dengan usulan perubahan nomenklatur struktur eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan pada 1 bidang di Bappeda DIY.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA DIY 2017-2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 15) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 16) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
- 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
- 19) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
- 20) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 Nomor 67/DPRD/2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Perubahan Renstra BAPPEDA DIY 2017-2022 disusun sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA DIY setiap tahunnya serta sebagai pedoman bagi seluruh personil di BAPPEDA DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.2.2 Tujuan

Perubahan Renstra BAPPEDA DIY 2017-2022 disusun dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
- 2) Sebagai pedoman bagi BAPPEDA DIY dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra BAPPEDA DIY 2017-2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BAPPEDA DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BAPPEDA DIY dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BAPPEDA DIY periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BAPPEDA DIY yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BAPPEDA DIY ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA DIY.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BAPPEDA DIY dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BAPPEDA DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB 2

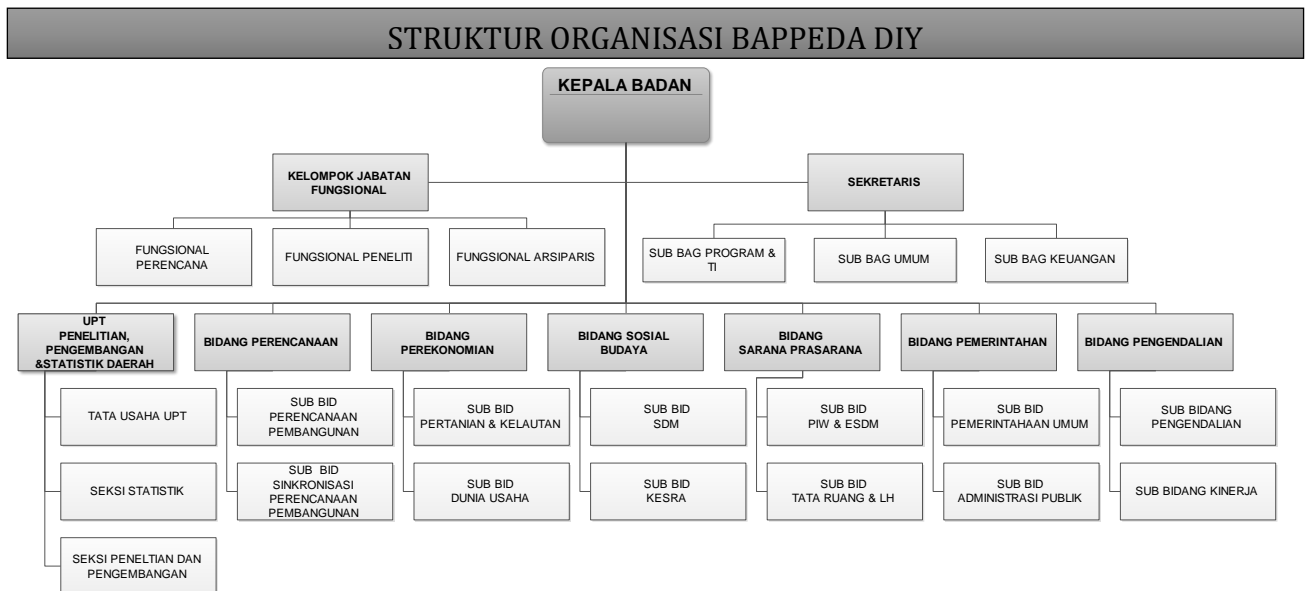
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA DIY

BAPPEDA DIY merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum;
- 3) Bidang Perencanaan terdiri dari Subbidang Perencanaan Sektor dan Subbidang Perencanaan terdiri dari Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
- 4) Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Subbidang Pemerintahan Umum dan Subbidang Administrasi Publik;
- 5) Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Subbidang Pertanian dan Kelautan, serta Subbidang Dunia Usaha;
- 6) Bidang Sosial Budaya, yang terdiri dari Subbidang Sumber Daya Manusia, Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah & Energi Sumberdaya Mineral dan Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan kesehatan;
- 8) Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Subbidang Kinerja Pembangunan;
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi BAPPEDA DIY dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi BAPPEDA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta BAPPEDA DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA DIY selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, dan dari internal selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA DIY

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

2.2.1.1 Profil Kepegawaian BAPPEDA DIY

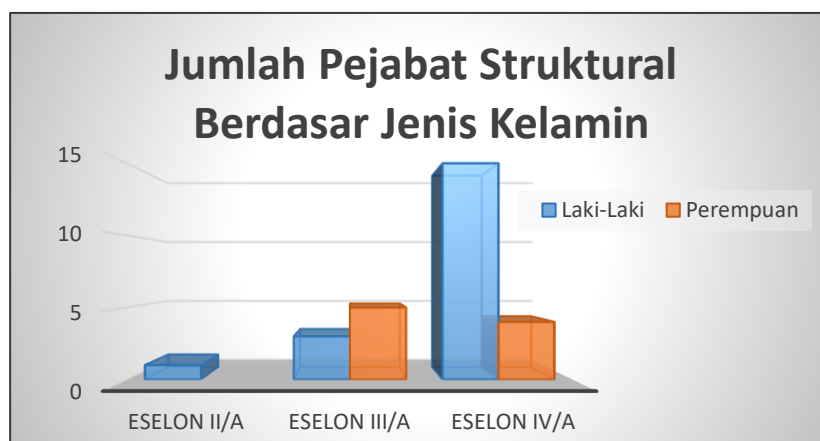
Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Profil kepegawaian di BAPPEDA DIY dikelompokkan menjadi pegawai instansi induk (BAPPEDA DIY) dan Balai Statistik Daerah (BSD) DIY.

Sumberdaya manusia di BAPPEDA DIY sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 98 pegawai yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, 19 orang pejabat fungsional tertentu, dan 54 orang fungsional umum, sedangkan pegawai yang tercatat di BSD DIY sebanyak 11 pegawai terdiri dari 4 Pejabat Struktural dan 7 pejabat Fungsional Umum. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

2.2.1.1.1 Profil Pejabat Struktural BAPPEDA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan kebutuhan formasi jabatan struktural BAPPEDA DIY sebanyak 29 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ada satu jabatan setara eselon IV yang belum terisi.

Pejabat struktural Eselon III di BAPPEDA DIY ada 8 orang, terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV ada 20 orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA DIY. Profil Pejabat Struktural di BAPPEDA DIY disajikan dalam Gambar 4.

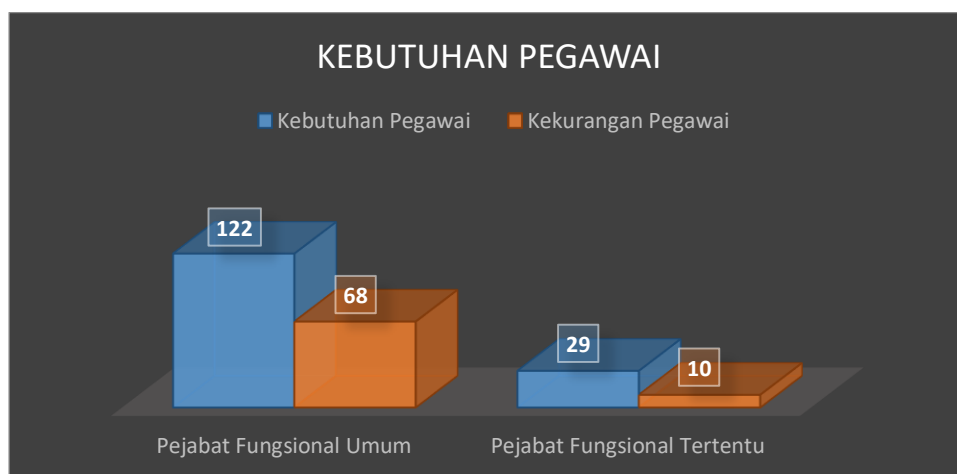


Gambar 4. Grafik Pejabat Struktural Berdasar Jenis Kelamin

2.2.1.1.2 Pejabat Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum

Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 tahun 2015 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY adalah : 1). Pejabat Fungsional Peneliti : 5 orang; 2). Pejabat Fungsional Perencana : 28 orang; 3). Pejabat Fungsional Arsiparis : 3 orang; dan 4). Fungsional Umum : 98 orang.

Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 BAPPEDA DIY memiliki 1 orang yang menduduki jabatan fungsional peneliti, 17 orang pada jabatan fungsional perencana, dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis, dan 60 orang fungsional umum. Kebutuhan pegawai dengan kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015 maka BAPPEDA DIY masih kekurangan sebanyak 10 orang. Kekurangan pegawai dihitung berdasarkan formasi dengan kualifikasi paling rendah (pertama). Komposisi kebutuhan pegawai dapat dilihat pada Gambar 5. berikut:



Gambar 5. Kebutuhan Pegawai BAPPEDA DIY

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana, BAPPEDA DIY telah mengirimkan personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana. Kebutuhan pegawai dengan kualifikasi jabatan fungsional umum sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana BAPPEDA DIY setiap tahun BAPPEDA DIY mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY mengupayakan penambahan tenaga non PNS atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA DIY.

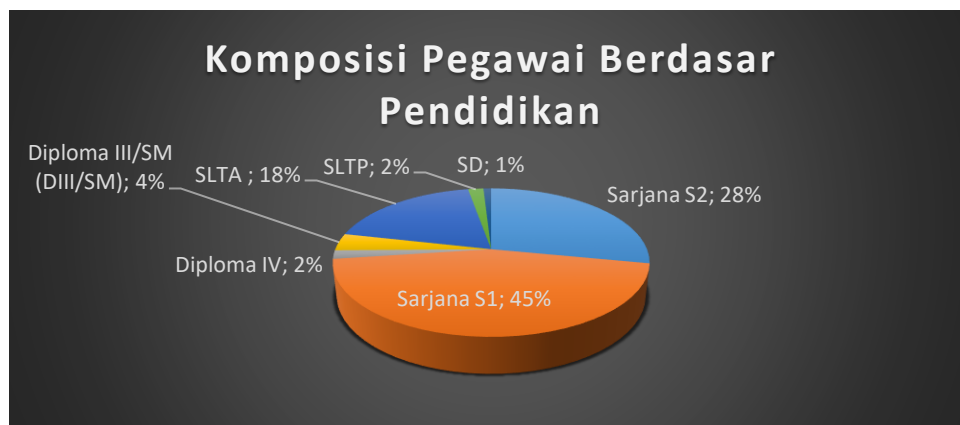
2.2.1.1.3 Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 2-1. berikut :

Tabel 2-1. Jumlah pegawai BAPPEDA DIY berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	18	12
2	Sarjana S1	23	25
3	Diploma IV	2	0
4	Diploma III/SM (DIII/SM)	3	1
5	SLTA	11	9
6	SLTP	2	0
7	SD	1	0

Jumlah pegawai BAPPEDA DIY per 31 Desember 2017 pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BAPPEDA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam Gambar 6 berikut:



Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari Gambar 6. dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BAPPEDA DIY didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (48 orang atau 45%), kemudian pegawai dengan pendidikan S2 (30 orang atau 28%), dan SLTA (20 orang atau 18%). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang, namun dari kualitas personil di BAPPEDA DIY (dengan kebijakan menambah personil non PNS atau Tenaga Ahli) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

2.2.2 Sarana Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA DIY dan BSD DIY dapat dilihat pada Tabel 2-2. berikut :

Tabel 2-2. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2017

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
ALAT-ALAT BESAR	2	Baik
ALAT-ALAT ANGKUTAN	29	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.132	Baik
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	268	Baik
BANGUNAN GEDUNG	5	Baik
JARINGAN	2	Baik
BUKU PERPUSTAKAAN	3.169	Baik

Sumber: BAPPEDA DIY 2017

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. BAPPEDA DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2013 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi.

2.2.3.1 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan)

Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi,

transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkan KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di DIY. Sejak dikembangkan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan secara signifikan dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan.



Gambar 7. Aplikasi Perencanaan Jogja Plan

2.2.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)

Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) dengan alamat akses <http://sipr.jogjaprov.go.id>, berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIY di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota;



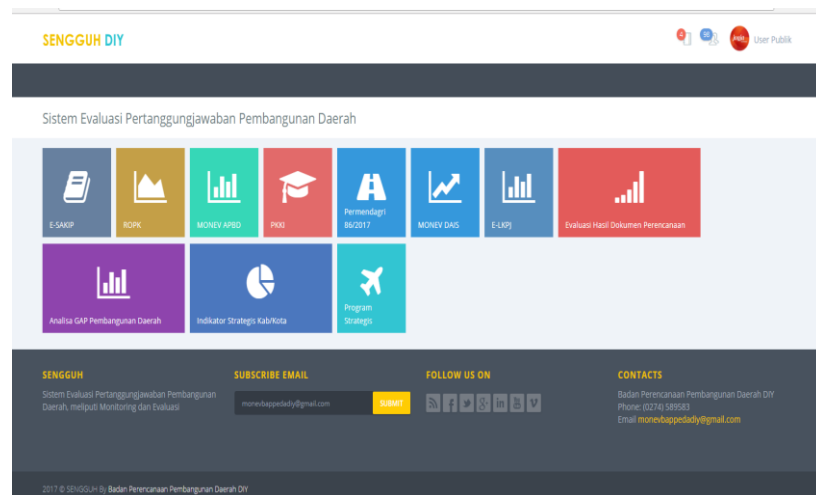
Gambar 8. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah selalu membawa konsekuensi yang harus diantisipasi. Kebutuhan ruang dalam melaksanakan aktivitas manusia yang selalu berkembang akan selalu memunculkan konflik ruang baik secara sosial, ekonomi, maupun

ekologis. SIPR sebagai salah satu *tool* diharapkan mampu membantu BKPRD DIY melaksanakan tugas dalam konteks meminimalkan konflik-konflik yang berpotensi muncul.

2.2.3.3 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja) dengan alamat akses <http://sungguh.jogjaprov.go.id>. Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

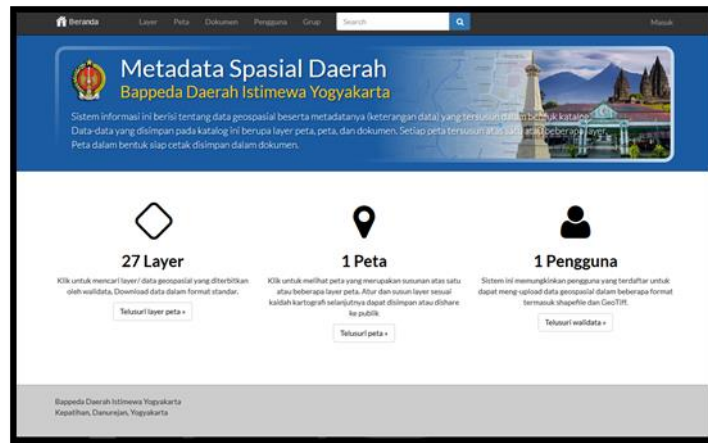


Gambar 9. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda DIY

Sistem monev yang dimiliki BAPPEDA DIY dalam usaha Pemerintah DIY meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah DIY untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik .

2.2.3.4 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)

Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. MDSD dengan alamat akses <http://gis.jogjaprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;



Gambar 10. Website Meta Data Spasial Daerah

Sistem Metadata Spasial merupakan sistem yang dibangun BAPPEDA DIY sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data spasial (keruangan) kepada publik. Publik dapat mengakses data melalui sistem MDSD dan mengambil manfaat dari data dan informasi spasial yang terkandung didalamnya.

2.2.3.5 Sistem Aplikasi Dataku

Sistem Aplikasi Dataku dengan alamat akses <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/> dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 11. Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Daerah

Sistem Aplikasi Dataku merupakan sistem pengelolaan data yang dibangun BAPPEDA DIY sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data pembangunan kepada publik. Publik dapat mengakses data dan informasi melalui sistem aplikasi dataku dan mengambil manfaat dari data dan informasi yang terkandung didalamnya.

2.2.3.6 Sistem Informasi Internal

BAPPEDA DIY merupakan Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup Pemda DIY. Sebagai Perangkat Daerah, BAPPEDA DIY seyogyanya bisa menjadi contoh bagi PD lain guna mewujudkan pengelolaan program kegiatan yang lebih baik. Tingginya tuntutan akan ketepatan data dan informasi membuat BAPPEDA DIY selalu berbenah dari waktu ke waktu. Peningkatan manajerial yang didukung dengan peningkatan teknologi pendukung selalu menjadi inovasi yang dapat diandalkan sebagai solusi utama. Teknologi terbukti mampu menciptakan efektifitas kerja dan akurasi hasil pekerjaan.

Aplikasi internal telah dikembangkan pada tahun 2015, dibangun fungsi dasar dalam proses pemantauan data monitoring evaluasi dan pengelolaan dana kas bulanan yang melibatkan multi bidang di internal BAPPEDA DIY. Pengembangan tersebut terbukti mampu membawa BAPPEDA DIY untuk meningkatkan kualitas aparatur menjadi lebih baik.



Gambar 12. Aplikasi Internal BAPPEDA DIY

Saat ini keberhasilan yang sudah diraih tersebut membuat BAPPEDA DIY semakin optimis untuk melangkah lebih jauh. Aplikasi Internal akan dikembangkan kembali untuk fungsi-fungsi yang lebih luas dan detail. Berbagai fitur teknologi ingin diwujudkan untuk semakin meningkatkan kemampuan aplikasi guna penanganan yang lebih optimal. Tahun 2016 aplikasi internal mengawal BAPPEDA DIY sebagai PD yang mampu memberikan ketauladanan bagi OPD lainnya dalam konteks manajemen program kegiatan dalam lingkup satu OPD.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAPPEDA DIY sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik serta mempunyai fungsi perumusan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk didalamnya fungsi pengendalian dan penyiapan data statistik penunjang perencanaan pembangunan.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 1) Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
- 2) Dokumen Kebijakan Umum dan Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- 3) Dokumen Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan (bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY);
- 4) Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pembangunan di DIY. Selain itu juga disusun dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005 – 2025 yang berlaku selama 20 tahun serta, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Kabupaten/Kota dan OPD/Biro ataupun *stakeholders* lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain dari BAPPEDA DIY adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. BAPPEDA DIY menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DIY merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA DIY

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2012-2017	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan				24,16	20,45	17,04	13,94	11,15	26,82	16,9				88,99	117,36			
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahun di bidang pemerintahan , perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sasaran prasarana				24,16	20,45	17,04	13,94	11,15	26,82	16,9				88,99	117,36			
	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD				74	79	84	91	100	77	79,1				104,05	100,13			

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia				94	96	97	98	100	92,39	96,04				98,29	100,04			
	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses				60	70	80	90	100	71,24	76,38				118,73	109,11			
2015-2016 (Perubahan I RPJMD)	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan						13,94	10,86				8,28	13,95				140,6	71,51	
	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD						84	89,14				86,57	92,7				103,06	104,94	

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan						97	98				97,07	98,03				100,07	100,03	
2017 (Perubahan II RPJMD)	Persentase Sinergitas Perencanaan								95					100					105,26
	Persentase Keterukuran Perencanaan								95					100					105,26
	Persentase Konsistensi Perencanaan								90					100					111,11
	Persentase Kelengkapan perencanaan								90					100					111,11
	Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan								92					100					108,7
	Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan								90					100					111,11

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja							95					100,92					106,23
	Persentase tingkat Pengukuran kinerja								90					102,9					114,33
	Persentase tingkat Pelaporan Kinerja								90					104,83					116,48
	Persentase tingkat Evaluasi Internal								95					100,12					105,39
	Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja								95					104,26					109,75
Rata-rata capaian kinerja (%)																			109,95
Predikat Kinerja																			Sangat Baik

Capaian kinerja pelayanan BAPPEDA DIY pada tahun 2013-2017 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) Tahun 2012-2017. Penetapan target kinerja tersebut dilakukan menunjukkan kinerja BAPPEDA DIY didalam pemenuhan layanan SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penetapan indikator kinerja BAPPEDA disesuaikan dengan periodisasi pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

Terdapat 3 (tiga) periodisasi pelaksanaan pembangunan di DIY sesuai RPJMD antara tahun 2012-2017, yakni :

- 1) Periode pembangunan tahun 2013 – 2014 dengan menggunakan dokumen RPJMD DIY 2012-2017 murni;
- 2) Periode pembangunan tahun 2015 – 2016 dengan menggunakan dokumen RPJMD DIY 2012-2017 perubahan I; dan
- 3) Periode pembangunan tahun 2017 dengan menggunakan dokumen RPJMD DIY 2012-2017 perubahan II.

Pembagian periodisasi pelaksanaan Pembangunan DIY pada jenjang waktu tahun 2012 – 2017 disesuaikan pada perubahan dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang dilakukan rasionalisasi RPJMD 2012-2017 dengan pertimbangan banyaknya target RPJMD yang sudah terlampaui target capaian kinerjanya dan tingkat urgensi tiap indikator sasaran.

Didalam ketiga periode pelaksanaan Pembangunan DIY tersebut, untuk BAPPEDA DIY, ditetapkan target indikator kinerja pelayanan yang berbeda pada masing-masing periode sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2-3.

Selanjutnya, sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 2-3, realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan BAPPEDA DIY pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam kurun waktu RPJMD 2012-2017, pada sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan, hampir semuanya telah memenuhi target bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target.

Satu-satunya target kinerja yang tidak berhasil dicapai oleh BAPPEDA DIY adalah target kinerja “persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan” pada periode RPJMD DIY 2012-2017 Perubahan I tahun 2016. Realisasi tahunan sebesar 13,95%, dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 10,86% belum dapat direalisasikan. Dari 129 indikator kinerja sasaran terdapat 18 sasaran kinerja tahunan yang belum mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut disebabkan lebih banyak faktor eksternal antara lain :

1. Musim kemarau basah sepanjang tahun 2016 menyebabkan target produksi pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan pada Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan tidak tercapai;
2. Belum optimalnya pelayanan di sektor transportasi dan kesehatan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan;

3. Dampak regulasi diantaranya kebijakan efisiensi penganggaran dan penyesuaian kewenangan sebagaimana mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga mempengaruhi kinerja pencapaian target kinerja yang ditetapkan, seperti yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Alokasi anggaran yang dibebankan pada masing-masing program untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada Tabel 2-4. Berikut:

Tabel 2-4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA DIY

Uraian		Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
2012-2017	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	1.572.003	1.702.443				1.458.888	1.661.278				92,8	97,58				108,30	113,87
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	4.939.115	5.646.311				4.355.341	5.339.189				88,18	94,56				114,32	122,59
	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target Sasaran RPJMD	1.698.578	3.244.822				1.504.594	2.873.522				88,58	88,56				191,03	190,98
	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	1.426.177	2.179.133				1.382.404	2.165.743				96,93	99,39				152,80	156,66
	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	931.930	321.944				872.388	319.976				93,61	99,39				34,55	36,68
2015-2016	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan			8.700.436	8.439.779				7.933.858	7.363.810				91,19	87,25		97,00	92,81

Urutan		Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target Sasaran RPJMD			2.010.844	3.725.150				1.978.553	3.415.772				94,18	91,69		185,25	172,64
	Prosentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan			1.193.335	2.907.263				1.174.014,	2.604.508				98,38	89,59		243,63	221,85
2017 (PERUBAHAN II RPJMD)	Persentase Sinergitas Perencanaan																	
	Persentase Keterukuran Perencanaan																	
	Persentase Konsistensi Perencanaan																	
	Persentase Kelengkapan Perencanaan					11.898.216					10.262.150					86,25	100,00	100,00
	Persentase Tingkat partisipatif dalam Perencanaan																	
	Persentasi Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan																	
	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja																	
	Persentase tingkat Pengukuran Kinerja					4.391.702					4.128.640					94,01	100,00	100,00
	Persentase tingkat Pelaporan Kinerja																	
	Persentase tingkat Evaluasi Internal																	
	Persentase tingkat Pencapaian sasaran Kinerja																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan di DIY tahun 2012-2017, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain :

- 1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- 2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
- 3) Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD;
- 4) Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

- 1) Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut maka BAPPEDA DIY dapat merencanakan secara lebih leluasa pada perumusan kebijakan pada lima urusan kewenangan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan;
- 2) Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;
- 3) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
- 4) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari OPD lain;

- 5) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
- 6) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan aplikasi JOGJAPLAN maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat (SIMLARAS dan KRISNA)
- 7) Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi web monev (SENGGUH) dan JOGJA DATAKU.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pembangunan DIY diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok, yaitu masih tingginya ketimpangan antar wilayah, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan disparitas IPM antar wilayah. Berdasarkan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, BAPPEDA DIY mengampu penunjang urusan yang memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan pokok tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA DIY, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu perencanaan dan statistik. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana. Sementara itu, dalam urusan statistik, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik, masih terdapat perbedaan data yang dihasilkan, dan perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam perencanaan. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3-1 berikut.

Tabel 3-1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan perencanaan			
1	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan waktu dan proses perencanaan di Pusat - Adanya kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di Daerah
2	Kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan Rencana	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencana
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala teknis pelaksanaan di lapangan - Kurangnya komitmen SDM pelaksana

Urusan Statistik			
3	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data	- Belum tersedia jabatan fungsional statistik
4	Perbedaan data statistik	Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama	- Perbedaan metodologi pengumpulan dan pengolahan data - Perbedaan kepentingan penggunaan data
5	Perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data perencanaan	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	- Peraturan dan kebijakan yang berbeda pada instansi penyedia data dan instansi perencana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan periode 5 tahun sebelumnya dengan periode yang setelahnya, sebagaimana Visi Misi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 berkesinambungan dengan periode sebelumnya. Pada periode 2012-2017, Visi Gubernur DIY memiliki tema “Jogja Renaisans” dengan visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.” Konsep “Renaisans Yogyakarta” diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep “*Renaisans Yogyakarta*” secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekanannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Konsep *Renaisans Yogyakarta* dan *Semangat Jogja Gumregah* tersebut dikemukakan kembali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017. Pemaparan visi misi mengambil tema “***Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***” merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Dari aspek **kesejarahan**, nenek moyang bangsa Jawa telah melakukan ekspansi dagang ke wilayah Timur Indonesia setelah pusat perdagangan Asia Tenggara bergeser dari Tuban ke Malaka untuk mengimbangi pedagang Cina yang hendak mencari komoditas rempah-rempah dan memperdagangkan barang-barang dari Jawa ke wilayah tersebut. Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang.

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara Samudra Hindia tersebut telah terbentuk **IORA** (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997). Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan dengan dibangunnya Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand). Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China. Khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak pada meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "*Abad Samudera Hindia*" juga untuk meningkatkan "*Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya*". Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*" dapat diartikan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta untuk meningkatkan kemuliaan martabat manusia khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Sehingga dirumuskan visi Gubernur DIY untuk lima tahun ke depan yaitu:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam pencapaian "Lima Kemuliaan" atau "Panca Mulia" yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari Visi Gubernur DIY 2017-2022 yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”. Etika, menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “karya yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan

lembaga-lembaga lain di luar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2, dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya

pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

3.2.2 Tujuan, Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022:

Tabel 3-2. Tujuan Dan Sasaran Pemda DIY 2017-2022
Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
				1.3. Meningkatkan Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan
				1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				1.5. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
					Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
				2.1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
				2.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
					bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

3.2.3 Tugas Dan Fungsi BAPPEDA DIY Yang Terkait Secara Langsung Dengan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 (ayat 1, ayat 5, dan ayat 6) BAPPEDA DIY dikategorikan sebagai Badan Daerah Provinsi

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Provinsi. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa BAPPEDA DIY mempunyai tugas sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tugas BAPPEDA ialah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-2 Gubernur dalam “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis*”. Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2015, dapat digambarkan dukungan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai berikut:

Tabel 3-3. Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”				
Misi ke-2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis				
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Urusan/ Tugas/ Fungsi Bappeda
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Urusan: 1. Penunjang Pemerintah : Perencanaan 2. Wajib Non Pelayanan Dasar : Statistik Tugas: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik
Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)."				Fungsi 1. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah; 5. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan; 6. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan; 7. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; 8. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tabel 3-3 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur DIY 2017-2022, tugas dan fungsi BAPPEDA DIY mendukung pelaksanaan misi ke-2 Gubernur dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis” yang memiliki tujuan berupa “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).” Tujuan tersebut diukur dengan pencapaian “Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022).” Adapun tujuan Pemerintah Daerah tersebut memiliki 3 sasaran yakni,

- 1) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan;
- 2) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa;

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan” diimplementasikan dengan pelaksanaan program Pemerintah Daerah “Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah” yang didukung beberapa perangkat daerah yang memiliki urusan penunjang yang mendukung dengan program pemerintah daerah tersebut. Salah satu urusan penunjang yang mendukung pencapaian sasaran dan program tersebut ialah urusan perencanaan yang dilaksanakan BAPPEDA DIY. Dukungan BAPPEDA DIY dengan menyelaraskan sasaran perangkat daerah dan tugas-fungsi perangkat daerah dalam menunjang capaian sasaran pemerintah daerah dan program pemerintah daerah terkait.

3.2.4 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BAPPEDA untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan BAPPEDA DIY terdapat adanya faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut:

Tabel 3-4. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA

No	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
Urusan perencanaan		
1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/ Bappenas b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah. c. Dukungan SDM BAPPEDA dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi d. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian
2.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakannya Arahan Gubernur kepada TAPD mengawali penyusunan perencanaan strategis lima tahunan maupun tahunan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran beserta forum-forum TAPD yang dilaksanakan mengikuti arahan tersebut. b. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. c. Dukungan SDM BAPPEDA dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi d. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogiakendali
3.	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka menjamin dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah. b. Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogiakendali. c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan d. Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah
Urusan Statistik		
3	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kerjasama BAPPEDA dan Institusi resmi pemerintah yang membidangi statistik, BPS b. Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan dan analisis pembangunan. c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
4	Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral b. Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
5	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral b. Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BAPPEDA KAB/KOTA

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas maupun Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan BAPPEDA DIY.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2014-2019 menetapkan 2 (dua) sasaran yang sebagai berikut

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari 1) Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
- 2) Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Dari dua sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan BAPPEDA DIY adalah sasaran 1. Kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

Tabel 3-5. Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra BAPPENAS	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi
2	Tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih			

Secara umum berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY, kata kunci sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan, keselarasan

perencanaan antar lembaga dan keselarasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah). Kualitas perencanaan ditunjukkan dengan pencapaian program/kegiatan yang sesuai antara target dan realisasi. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan pelayanan BAPPEDA DIY berdasarkan sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3-6. Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A. BAPPEDA Kota Yogyakarta				
1	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral	<ul style="list-style-type: none">Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/KotaProses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
B BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo				
1	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral	<ul style="list-style-type: none">Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/KotaProses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
2	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang perencanaan, pengendalian dan OPD pelaksana.	<ul style="list-style-type: none">Adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasiProses pengendalian yang didukung dengan teknologi informasi
C BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul				
1	Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral	<ul style="list-style-type: none">Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/KotaProses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi

2	Terwujudnya keselarasan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada keterbatasan kapasitas perencanaan pada OPD Mitra • Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi • Kualitas SDM yang memadai
D BAPPEDA Kabupaten Sleman				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Data yang dibutuhkan dalam perencanaan belum tersedia tepat waktu sesuai tata kala perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kinerja sumber daya pengumpul data • Masih adanya perbedaan definisi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya kerjasama dengan BPS • Adanya sistem informasi pendukung pengembangan data
4	Meningkatkan kualitas perencanaan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahan dan sektoral serta antara	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi	perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan irigasi			
7	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup			
8	Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang daerah dan sarpras			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW merupakan matra spasial pembangunan daerah dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup

perencanaan ruang darat, laut, dan udara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun.

Adapun perwujudan indikasi program utama lima tahunan terdiri dari nama program, lokasi, besaran, periode pelaksanaan Tahap I, sumber biaya, Instansi pelaksana dan periode pelaksanaan (5 tahunan). RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan budidaya. Kawasan Lindung meliputi :

- 1) Kawasan Lindung bawahan;
- 2) Kawasan Lindung setempat;
- 3) Kawasan Suaka Alam;
- 4) Kawasan Suaka Margasatwa;
- 5) Kawasan Rawan Bencana Alam;

Kawasan budidaya memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Secara umum, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang di kawasan budidaya terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
- 2) Kawasan peruntukan pertanian;
- 3) Kawasan peruntukan perikanan;
- 4) Kawasan peruntukan pertambangan;
- 5) Kawasan peruntukan industri;
- 6) Kawasan peruntukan pariwisata;
- 7) Kawasan peruntukan permukiman;
- 8) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- 9) Kawasan peruntukan lainnya

Pemda DIY telah melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009–2029. Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar peninjauan kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu:

- 1) Adanya perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.

- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sektor untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan rencana pembangunan bandara baru.
- 3) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
- 4) Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Keselarsan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk didalamnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas BAPPEDA DIY dalam menjaga keselarsan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

BAPPEDA DIY selaku Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DIY melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait dengan penyusunan program dan penyusunan

dokumen perencanaan pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk sinkronisasi pembangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJMD DIY didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut:

- 1) Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan DIY, terutama kemacetan, persampahan, konversi lahan, gentrifikasi, PKL, dan nilai hidup dan budaya
- 2) Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas
- 3) Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan)

Hasil dari proses penapisan isu panjang menghasilkan lima isu strategis yang terdiri dari isu lingkungan (2 isu), isu ekonomi (2 isu) dan Isu sosial (1 isu) yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
- 2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian
- 3) Ketimpangan wilayah masih tinggi
- 4) Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan belum optimal
- 5) Angka kemiskinan masih tinggi

Program pembangunan daerah yang telah dikaji dalam KLHS memiliki dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Kedua program pemda tersebut yaitu program pengembangan sektor dominan dan program pengembangan pusat pertumbuhan. Kedua program tersebut dapat memiliki pengaruh yang negatif dua isu strategis pembangunan berkelanjutan terutama isu pencemaran, kerusakan lingkungan dan risiko bencana dan isu pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal dan masih tingginya alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya impikasi terhadap pelayanan BAPPEDA DIY yaitu BAPPEDA DIY melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan serta para stakeholder sebagai langkah antisipasi

agar ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat lestari, pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui PLP2B serta pemantauan/monev sumber pencemar lingkungan.

Tabel 3-7. Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan BAPPEDA DIY ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi BAPPEDA DIY pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	BAPPEDA DIY selaku Sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan Pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kapasitas SDM yang memahami KLHS terbatas - Adanya regulasi tentang KLHS yang saling tumpang tindih antara Kemendagri dan KLHK dan belum adanya turunan dari PP 46 tahun 2016 	Adanya regulasi tentang KLHS (Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentri) yang menegaskan kewajiban untuk penyusunan dokumen KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPEDA DIY senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BAPPEDA DIY di masa datang.

Perumusan isu-isu strategis BAPPEDA DIY untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi BAPPEDA DIY; (2) gambaran pelayanan BAPPEDA DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra BAPPEDA kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subab-subab sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tusi
Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan di BAPPEDA DIY yaitu: (a) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah; (b) Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan (c) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan. Sedangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan statistik yaitu: (a) Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data; (b) Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama; dan (c) Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan
- 2) Gambaran pelayanan BAPPEDA DIY
Target kinerja di dalam renstra BAPPEDA DIY periode sebelumnya telah tercapai kecuali pada indikator persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Kinerja pelayanan BAPPEDA DIY telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya sistem informasi yang menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang semakin berkualitas maupun untuk manajerial internal BAPPEDA DIY. Dari sisi kualitas, BAPPEDA DIY sudah didukung dengan SDM yang berkompeten, akan tetapi dari sisi kuantitas masih kekurangan.
- 3) Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan BAPPEDA DIY adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh perencanaan di daerah karena harus ada keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota
Secara umum Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY memiliki sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas perencanaan, keselerasan perencanaan antar lembaga dan keselerasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah).
- 5) Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPPEDA DIY
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- 6) Implikasi KLHS bagi pelayanan BAPPEDA DIY
Implikasi dari KLHS adalah BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, maka harus dilakukan KLHS.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan dan statistik, serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2017-2022) yaitu:

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan *dataku* sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Isu-isu strategis di atas telah mempertimbangkan aspek-aspek dalam perumusan isu strategis.

Tabel 3-8. Rumusan Isu-Isu Strategis

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
Kinerja Pelayanan	Sub bab 2.2	Mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015, BAPPEDA DIY masih kekurangan pegawai
		Sistem informasi sangat membantu BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi
	Sub bab 2.3	capaian kinerja BAPPEDA DIY tahun 2013 -2017 dalam kurun waktu RPJMD 2012-2017, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Satu indikator yang tidak mencapai target yaitu " persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan".
Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah	Sub bab 2.4	1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
		2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
		3) Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD
		4) Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah
		5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai <i>feedback</i> bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	Sub bab 2.4	1) Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut maka BAPPEDA DIY dapat merencanakan secara lebih leluasa pada perumusan kebijakan pada lima urusan kewenangan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan

Perumusan Isu-isu Strategis
1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> , dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5) Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
		2) Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi
		3) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan
		4) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari OPD lain
		5) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian
		6) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan aplikasi JOGJAPLAN maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat (SIMLARAS dan KRISNA)
		7) Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi web monev (SENGGUH) dan JOGJA DATAKU
Permasalahan	Sub bab 3.1	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah
		Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan
		Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data
		Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama
		Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan
Telaah Visi, Misi, dan Program	Sub bab 3.2	Faktor Penghambat Pelayanan BAPPEDA:
		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah

Perumusan Isu-isu Strategis

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
Kepala Daerah		Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan
		Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data
		Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama
		Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan
		Faktor Pendorong Pelayanan BAPPEDA:
		Dukungan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/ Bappenas
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.
		Dukungan SDM BAPPEDA dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian
		Dilaksanakannya Arahan Gubernur kepada TAPD mengawali penyusunan perencanaan strategis lima tahunan maupun tahunan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran beserta forum-forum TAPD yang dilaksanakan mengikuti arahan tersebut
		Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
		Dukungan SDM BAPPEDA dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka menjamin dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.

Perumusan Isu-isu Strategis

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
		Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali.
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan
		Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah
		Pelaksanaan kerjasama BAPPEDA dan Institusi resmi pemerintah yang membidangi statistik, BPS
		Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan dan analisis pembangunan.
		Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
		Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral
		Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial
Telaah Renstra K/L	Sub bab 3.3	Dari dua sasaran strategis Bappenas, yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan BAPPEDA DIY adalah sasaran 1 yaitu perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah
Telaah Renstra Bappeda Kab/kota	Sub bab 3.3	Secara umum berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY, kata kunci sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan, keselarasan perencanaan antar lembaga dan keselarasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah)
		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Telaah RTRW	Sub bab 3.4	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi BAPPEDA DIY pada peran koordinasi
Telaah KLHS	Sub bab 3.4	Dokumen perencanaan Pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS

Perumusan Isu-isu Strategis

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA DIY

Tujuan BAPPEDA DIY dirumuskan berdasarkan analisa permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah diuraikan pada BAB 3 antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban BAPPEDA DIY untuk periode 2017-2022 menetapkan tujuan BAPPEDA DIY adalah ***“Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi”***. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”***.

Tujuan BAPPEDA DIY *menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi* mempunyai makna bahwa BAPPEDA DIY harus mampu menjadi penggerak pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah DIY. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi harus dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. BAPPEDA DIY harus mampu menjadi Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan daerah yang baik sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan yang disusun harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Rasionalitas dan basis data adalah ciri yang menjadi kunci kualitas perencanaan.

Perencana yang Bernilai Tinggi mengandung maksud bahwa perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi PD (Perangkat Daerah) dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing serta kelembagaan BAPPEDA DIY menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*. Selain itu, perencanaan yang disusun BAPPEDA DIY harus merupakan perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan visioner (berorientasi ke depan).

Berkenaan dengan permasalahan dan pelaksanaan tugas-fungsi terkait serta menunjang program pemerintah daerah DIY dapat diuraikan sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah BAPPEDA DIY yang termuat dalam draft cascading RPJMD DIY 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”. Kualitas dimaksud ditunjukkan melalui ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah. Maka BAPPEDA DIY harus mampu menjadi institusi perencanaan yang dapat menjamin perencanaan pembangunan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4-1. Tujuan, indikator tujuan/sasaran BAPPEDA DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator sasaran Perangkat Daerah tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah BAPPEDA dari tahun 2017-2022 kami sampaikan dalam Tabel 4-2. sebagai berikut:

Tabel 4-2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Based line (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator sasaran PD tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai DIY harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan jaman, kemajuan daerah lainnya, dan lingkungan eksternal lainnya. Disamping itu lingkungan internal juga menjadi pertimbangan yang penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan, sasaran, visi, dan misi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

5.1 Strategi Dan Kebijakan

5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

5.1.1.1 Identifikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang Dan Tantangan

Tabel 5-1. Identifikasi Lingkungan Strategis

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S1	Sarana / prasarana Kerja yang memadai	W1	Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan
S2	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W2	Lemahnya koordinasi internal dan antar bidang dan dengan SKPD
S3	Kualitas SDM yang memadai	W3	Belum adanya sistem baku untuk mengantisipasi perubahan kebijakan
S4	Motivasi bekerja yang kuat	W4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
S5	Adanya forum data pembangunan daerah		
FAKTOR EKSTERNAL			
No.	PELUANG (O)	No.	ANCAMAN (T)
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	T1	Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
O2	Perkembangan teknologi/ sistem informasi	T2	Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi
O3	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang semakin optimal	T3	Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan
O4	Keberadaan forum <i>Pentahelix (Academic, Business, Community, Government, dan Media)</i> yang mendukung perencanaan pembangunan	T4	Masih belum optimalnya Komitmen instansi pelaksana

5.1.1.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgensi atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen.

5.1.2 Perumusan dan Penetapan Strategi

5.1.2.1 Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

- a. **Strategi ekspansi** dirumuskan pada kuadran I.
Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO ke arah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.
- b. **Strategi diversifikasi** dirumuskan pada kuadran II.
Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.
- c. **Strategi stabilitas / rasionalisasi** dirumuskan pada kuadran III
Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Strategi defensif / survival** dapat dirumuskan pada kuadran IV.
Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut:

	Strength (S)	Weakness (W)
IFAS	Sarana / prasarana Kerja yang memadai.	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Lemahnya koordinasi internal dan antar bidang, dan dengan SKPD.
EFAS	Kualitas SDM yang memadai.	Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja.
	Motivasi bekerja yang kuat.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
	Adanya forum data pembangunan daerah.	
Opportunities (O)	S-O	W-O
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Untuk mengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan Monitoring Evaluasi
Keberadaan forum Pentahelix yang mendukung perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix	Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi
Threats (T)	S-T	W-T
Kurangnya komitmen kabupaten/ Kota dalam perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan	Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi
Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi	Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan	Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi
Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabupaten/kota	Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/ kota

5.1.2.2 Penerapan Strategi

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dari dua misi Gubernur DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 secara langsung Bappeda mendukung pada Misi ke 2. Secara rinci strategi dan arah kebijakan BAPPEDA DIY dalam mendukung misi ke-dua Gubernur DIY dapat dilihat pada Tabel 5-2.

Tabel 5-2. Tujuan , Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja					
MISI 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Menjadi Institusi Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang Bernilai Tinggi	yang	pembangunan berkualitas	1. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.		1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.
			2. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan.		2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.
			3. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix.		3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.
			4. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan		4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
			5. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan		5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,
			6. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota		6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.

7. Meningkatkan Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi	Teknologi	7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
8. Memanfaatkan Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Teknologi	8. membangun link antar sistem informasi yang ada di internal BAPPEDA DIY dan dengan sistem informasi di luar BAPPEDA DIY yang terkait.
9. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi		9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan
10. Memanfaatkan Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan	Teknologi	10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur
11. Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi		11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data
12. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota		12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.
		13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

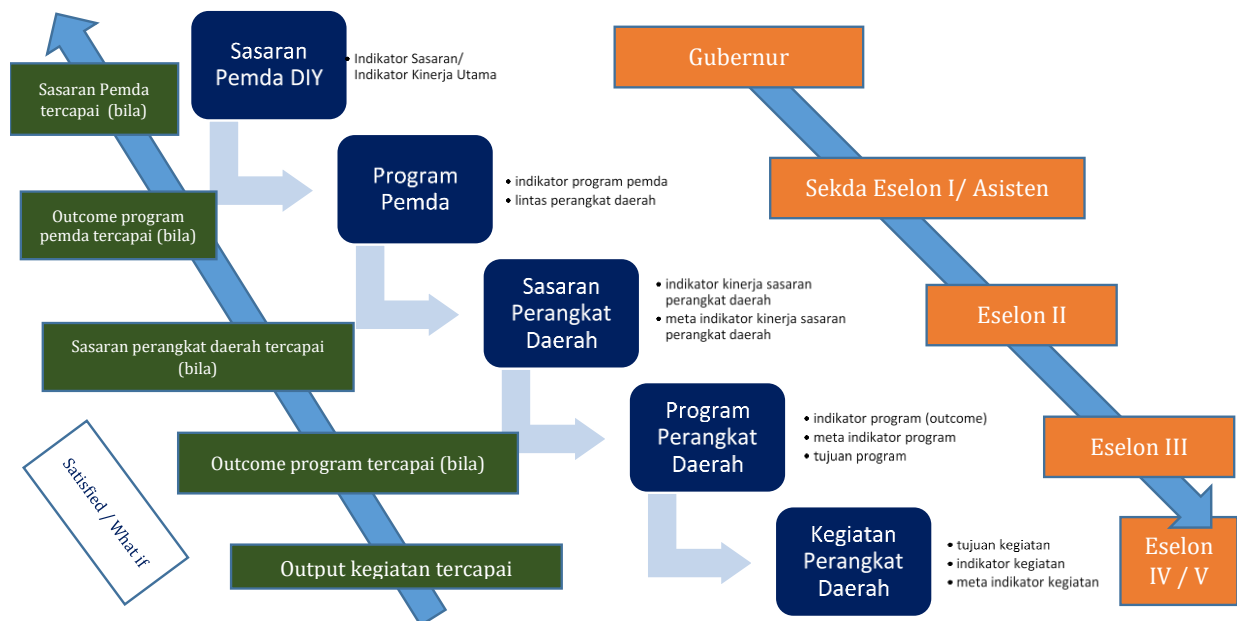
Rencana program/kegiatan BAPPEDA DIY disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena ada perubahan Peraturan daerah yang mengatur kelembagaan Pemerintah Daerah DIY maka rencana program/kegiatan BAPPEDA DIY untuk lima (5) tahun direncanakan untuk dua periode, periode 2017-2018 menyesuaikan struktur organisasi BAPPEDA DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk periode 2019-2022 menyesuaikan struktur organisasi berdasar pada Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY yang berfungsi sebagai institusi perencanaan, statistik, serta pengendalian terdiri 12 program yaitu: Program Pengembangan Statistik Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Program Pengendalian Pembangunan Daerah, Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (pada tahun 2018), Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatu, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2018 pada tahun 2019 ada penambahan Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari dua kegiatan yaitu Penelitian Pembangunan Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan penajaman kegiatan dan perubahan kegiatan sesuai dengan substansi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 Nomor 67/DPRD/2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan kegiatan pada Program

Perencanaan Pembangunan Daerah yang diikuti dengan usulan perubahan nomenklatur struktur eselon IV sebagai penanggung jawab kegiatan pada salah satu bidang di Bappeda DIY yaitu Bidang Perencanaan, serta perubahan kegiatan pada bidang-bidang lain di Bappeda DIY yang tidak diikuti perubahan nomenklatur struktur eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan. Perubahan tersebut menyesuaikan proses penyusunan meta program yang mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda DIY) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Gubernur, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (*output*) mendukung capaian hasil (*outcome*) program sesuai dengan kerangka logis *cascading* RPJMD DIY 2017-2022. Hierarki yang dideskripsikan dalam meta program dapat digambarkan melalui potongan kerangka logis *cascading* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut,



Gambar 12. Kerangka Logis Meta Program berdasar RPJMD DIY 2017-2022

Berdasarkan hierarki kerangka logis tersebut, konstruksi meta program dapat diterangkan sebagai berikut,

Tabel 6-1. Matriks Meta Program

IKU (1)	META PROGRAM (2)	
GUBERNUR	OPD	Diisi Nama Perangkat Daerah sebagai pelaksana program kegiatan
	SASARAN PEMDA	Diisi dengan Sasaran Pemda yang didukung oleh program yang diuraikan; lihat RPJMD
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	Diisi dengan Indikator Sasaran yang sudah ada didalam RPJMD (<i>berupa baseline, tahun ke- 1 s/d tahun ke-5</i>)
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Diisi dengan Program PEMDA yang sudah ada didalam RPJMD
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Diisi dengan Indikator Program PEMDA yang sudah ada didalam RPJMD (<i>berupa baseline, tahun ke- 1 s/d tahun ke-5</i>)
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Diisi dengan Sasaran Perangkat Daerah yang sudah ada didalam RPJMD/cascade
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Diisi dengan Indikator Sasaran yang sudah ada didalam RPJMD/cascade (<i>berupa baseline, tahun ke- 1 s/d tahun ke-5</i>)
	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Diisi definisi, cara perhitungan, data dasar dan sumber datanya.
ESELON III	NAMA PROGRAM	Diisi dengan Nama Program yang sudah ada di dalam RPJMD
	INDIKATOR PROGRAM	Diisi dengan indikator yang sudah ada didalam RPJMD (<i>berupa baseline, tahun ke- 1 s/d tahun ke-5</i>)
	META INDIKATOR PROGRAM	Diisi definisi, cara perhitungan, data dasar dan sumber datanya.
	TUJUAN PROGRAM	Diisi gambaran umum tentang tujuan besar dari program, gambaran kondisi umum (disertai dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan program ini. Serta digambarkan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam program ini.
ESELON 4/ ESELON 5	KEGIATAN 1	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak ambigu dan menggambarkan aktivitas didalamnya.
	TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindak lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam program. Gambaran kondisi umum (disertai dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan kegiatan ini dalam rangka mendukung program. Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.
	INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjukkan kondisi yang ada menjadi posisi menjadinya. (<i>berupa baseline, tahun ke- 1 s/d tahun ke-5</i>)
	META INDIKATOR KEGIATAN	Menguraikan definisi, cara perhitungan, data dasar dan sumber datanya.

Berkenaan dengan proses penajaman kegiatan dengan meta program dapat disajikan program kegiatan Bappeda DIY setelah perubahan Renstra Bappeda DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 6-2. Perubahan Kegiatan Bappeda DIY Pasca Penajaman Kegiatan Meta Program

No.	Program	Kegiatan Renstra Bappeda DIY	Kegiatan Perubahan Renstra Bappeda DIY (setelah proses meta program)	Bidang/ UPT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Pengelolaan Data dan Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik	Balai Statistik Daerah	
		Penyajian Informasi Statistik dan Data	Tetap	Balai Statistik Daerah	
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah:	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bidang Perencanaan	diusulkan eselon 4/ subbid pengampu pada Bidang Perencanaan dari Subbid Perencanaan Kewilayahan menjadi Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral,	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	Bidang Perencanaan	diusulkan eselon 4/ subbid pengampu pada Bidang Perencanaan dari Subbid Perencanaan Sektoral menjadi sub bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
		Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,	Menjadi bagian dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bidang Perencanaan	
		Penyusunan Background Study RPJMD	Menjadi bagian dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bidang Perencanaan	
3.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Bidang Perekonomian	
		Penyusunan Perencanaan	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian	Bidang Perekonomian	

No.	Program	Kegiatan Renstra Bappeda DIY	Kegiatan Perubahan Renstra Bappeda DIY (setelah proses meta program)	Bidang/ UPT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Dunia Usaha	dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha		
		Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Bidang Perekonomian	
4.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	Bidang Sosial Budaya	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	Bidang Sosial Budaya	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya (2018).	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Budaya	Bidang Sosial Budaya	Kegiatan digunakan oleh Kelembagaan Baru pada Paniradya Babagan Kaistimewaan (2019)
		Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	Bidang Sosial Budaya	
5.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana:	Penataan Ruang Daerah (2018),	Kegiatan tersebut pada tahun 2019 tidak digunakan	Bidang Sarana dan Prasarana	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM (2018),	Kegiatan tersebut pada tahun 2019 tidak digunakan	Bidang Sarana dan Prasarana	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH (2018),	Kegiatan tersebut pada tahun 2019 tidak digunakan	Bidang Sarana dan Prasarana	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan ESDM,	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	Bidang Sarana dan Prasarana	

No.	Program	Kegiatan Renstra Bappeda DIY	Kegiatan Perubahan Renstra Bappeda DIY (setelah proses meta program)	Bidang/ UPT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan LH,	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Bidang Sarana dan Prasarana	
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD Gas Rumah Kaca.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	Bidang Sarana dan Prasarana	
6.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan:	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	Bidang Pemerintahan	
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik.	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	Bidang Pemerintahan	
7.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	tetap	Bidang Pengendalian	
		Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah.	tetap	Bidang Pengendalian	
8.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (pada tahun 2018):	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (2018)	tetap	Bidang Perencanaan	Kegiatan digunakan oleh Kelembagaan Baru pada Paniradya Babagan Kaistimewaan (2019)
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan (2018)	tetap	Bidang Perencanaan	Kegiatan digunakan oleh Kelembagaan Baru pada Paniradya Babagan Kaistimewaan (2019)
9.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah:	Penelitian Pembangunan Daerah,	tetap	Balai Statistik Daerah	
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan	Penyelenggaraan Jejaring Penelitian	Balai Statistik Daerah	

No.	Program	Kegiatan Renstra Bappeda DIY	Kegiatan Perubahan Renstra Bappeda DIY (setelah proses meta program)	Bidang/ UPT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah		
10.	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan, Perlengkapan Perkantoran	Jasa, dan tetap	Sekretariat	
		Penyediaan Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tetap	Sekretariat	
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi.	Rapat tetap	Sekretariat	
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan tetap	Sekretariat	
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor,	Rumah tetap	Sekretariat	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan,	Peralatan tetap	Sekretariat	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan tetap	Sekretariat	
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu,	Tetap, digunakan tahun 2019	Sekretariat	
13.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD,	Kinerja tetap	Sekretariat	
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD,	Keuangan tetap	Sekretariat	
		Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi.,	Program tetap	Sekretariat	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD,	dan tetap	Sekretariat	
		Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan	Digunakan pada tahun 2018	Sekretariat	Tahun 2019 tidak digunakan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem

No.	Program	Kegiatan Renstra Bappeda DIY	Kegiatan Perubahan Renstra Bappeda DIY <i>(setelah proses meta program)</i>	Bidang/ UPT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Fungsional Tertentu (2018)			Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan untuk disesuaikan dengan program yang sesuai

Indikator Kinerja program dan kegiatan BAPPEDA DIY menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA DIY Tahun 2017-2022. Indikator kinerja BAPPEDA DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 6-1 berikut.

Tabel6-3. RencanaProgram,Kegiatan danPendanaanPerangkatDaerahBAPPEDADIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggunj-awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menjadi institusi perencanaan yang bernilai tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	16	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	1.261.754	100 %	1.387.928,8	100 %	1.526.721,7	100 %	1.679.393,9	100 %	1.847.333,2	100 %	7.703.131,2	BAPPEDA DIY	DIY
					Tingkat kepuasan pelanggan	67,13 %	68,00%		69,00%		70,00%		71,00%		72,00%		72,00 %			
			004	Pengelolaan Data dan Statistik Daerah	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan; 2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 4. Dokumen Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 5. Dokumen Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnosis Kemajuan Daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 6. Dokumen Analisis Indeks Gini sebagai pendukung bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 7. Konreg PDRB se Jabalnusra sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan	1. 6 Dokumen tersusun dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. pelaksanaan Konreg PDRB se Jabalnusra sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan	Tersedianya 3 jenis data untuk mendukung perencanaan	411.754	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersedianya 4 jenis data untuk mendukung perencanaan	411.754	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyediaan Data Statistik	1. Dokumen Analisis PDRB 2. Dokumen Analisis ICOR DIY 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY 4. Dokumen Analisis IPM per Kecamatan 5. Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah 6.Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah. 7. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah 8. Dokumen Analisis Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Analisis IPM per kecamatan) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 4 dokumen	680.321,8	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	748.354	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	823.189	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	905.508	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	3.127.372,8	BAPPEDA DIY	DIY
			005	Penyajian Informasi dan Data Statistik	1. Update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Meta Data Spasial, 2. Forum data dan simpul jaringan;	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Meta Data Spasial, dan	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Meta Data Spasial, dan	850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Aplikasi dan	850.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggunj-awab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						terselenggaranya forum data dan simpul jaringan 100% tepat waktu	terselenggaranya forum data dan simpul jaringan 100% tepat waktu										1 Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi			
					1. Update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Geoportal DIY 2. Forum data dan simpul jaringan 3. Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY 100% tepat waktu;	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data	707.607	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data	778.368	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data	856.204	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data	941.825	Terlaksananya pengembangan Aplikasi dan terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data	3.284.004	BAPPEDA DIY	DIY
	1	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	2.118.913,50	100%	2.281.806	100%	0%	2.527.193,70	100%	2.592.968.5	100%	2.749.552.4	100%	12.270.434.2	BAPPEDA DIY	DIY	
	33	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar - Surat Masuk - Pengiriman Dokumen - Benda Pos 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY dan BSD 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : - Barang Cetakan - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis - Buku Ilmu Pengetahuan Umum - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip - Penilaian dan Penyusutan arsip	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	935.271	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	862.792	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	942.604	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	989.734	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	1.039.220	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100%	4.849.621,61	BAPPEDA DIY	DIY		
	34	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan selama 12 bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	70.026	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	204.368	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	224.805	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	236.045	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	247.847	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	983.091,13	BAPPEDA DIY	DIY		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggunj-awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			35	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.113.616	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.214.646	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.359.785	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.367.189	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.462.485	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	6.437.720,65	BAPPEDA DIY	DIY
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	931.092,30	100%	1.228.115,50	100%	912.546	100%	943.366	100%	974.187	100%	4.989.306,80	BAPPEDA DIY	DIY
			108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	177.282	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	486.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	200.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	195.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	180.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	1.338.282	BAPPEDA DIY	DIY
			109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara (2 unit)	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	280.000	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	328.461	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	298.909	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	313.854	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	329.547	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	1.470.771	BAPPEDA DIY	DIY
			111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	127.940	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	130.764	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	130.746	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	137.283	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	144.147	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	670.881	BAPPEDA DIY	DIY
			112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: 1. Kendaraan dinas roda 4 (14 unit) 2. Kendaraan dinas roda 2 (7 unit)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	345.870	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	282.891	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	282.891	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	400.666	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	320.492	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	1.509.373	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	N/A	N/A	100%	108.460	100%	119.306	100%	297.228	100%	130.152	100%	482.647	BAPPEDA DIY	DIY
			5	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: - Penilaian Angka Kredit (2 Kali) - Penerbitan Jurnal (1 kali)	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	108.460	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	119.306	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	124.729	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	130.152	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	482.647	BAPPEDA DIY	DIY
				Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur	Terlaksananya peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda	N/A	N/A	N/A	Terlaksanananya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda 100%	75.900	Terlaksanananya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda 100%	83.750	Terlaksanananya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda 100%	91.350	Terlaksanananya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda 100%	99.200	Terlaksanananya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Bappeda	350.200	BAPPEDA DIY	
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	568.689,40	100%	500.000	100%	634.049.4	100%	670.282.1	100%	731.760,40	100%	3.104.781,50	BAPPEDA DIY	DIY
			16	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKjiP A	Nilai LKjiP A	18.200	Nilai LKjiP A	16.335	Nilai LKjiP A	19.602	Nilai LKjiP A	21.562	Nilai LKjiP A	23.718	Nilai LKjiP A	96.068	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggun- gi- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			17	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an keuangan 100% tepat waktu	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an keuangan 100% tepat waktu	37.400	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	32.256	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	40.320	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	44.352	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	48.787	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	186.675	BAPPEDA DIY	DIY
			18	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Rencana Kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen 2. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan 3. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	378.653	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	439.153	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	559.420	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	588.190	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	641.459	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	2.591.753	BAPPEDA DIY	
			19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	17.502	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	12.255	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	14.707	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	16.178	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	17.796	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	72.079	BAPPEDA DIY	DIY
			21	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu - Penilaian Angka Kredit - Penerbitan Journal	100%	2 kali 1 kali	116.935	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	158.689	BAPPEDA DIY	
																				DIY
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100 %	100 %	2.927.406	100 %	2.113.389	100 %	2.450.000	100 %	2.700.000	100 %	3.250.000	100 %	13.440.795	BAPPEDA DIY	DIY
					Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
			072	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	1. .Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Konsultasi Publik 2. Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Musrenbang 3. Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD 4. Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2019 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 7. DokumenPenetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 Sejumlah 200 Eksemplar 8. Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen 9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target	Tersusunnya Peraturan Gubernur RKPD DIY Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017, 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Peraturan Gubernur RKPD DIY Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018, 100% Tepat Waktu	1.883.239	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.883.239	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggun- gi- awab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 10. Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen															
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS sebanyak 1 dokumen 2. Dokumen RKPDP sebagai dasar Penyusunan KUPA PPASP sebanyak 1 dokumen 3. Dokumen KUA PPAS sebagai Dasar Penyusunan RAPBD sebanyak 1 dokumen 4. Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP sebanyak 1 dokumen 5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan) sebanyak 1 aplikasi 6. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2022-2027 1 dokumen 7. Dokumen Naskah Akademik RPJMD 2022-2027 1 dokumen	N/A	N/A		1.Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan sebanyak 4 dokumen 2.Terlaksananya pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu sebanyak 1 aplikasi	1.777.189	1. Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan sebanyak 4 dokumen 2.Terlaksananya pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu sebanyak 1 aplikasi	2.080.180	1.Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan sebanyak 4 dokumen 2.Terlaksananya pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu sebanyak 1 aplikasi	2.143.198	1.Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan sebanyak 4 dokumen 2.Terlaksananya pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu sebanyak 1 aplikasi	2.202.518	1.Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan sebanyak 4 dokumen 2.Terlaksananya pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu sebanyak 1 aplikasi	8.206.085	BAPPEDA DIY	DIY
			073	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	1. Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun n+1 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD sejumlah 200 eks 2. Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD sejumlah 250 eks 3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD sejumlah 200 eks Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2018 sejumlah 250 eks Dokumen Roadmap Tematik, sejumlah 50 Eksemplar	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2018 dan KUPA-PPAS Tahun 2017, 100% tepat waktu	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2019 dan KUPA-PPAS Tahun 2018, 100% tepat waktu	366.222	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	366.222	BAPPEDA DIY	DIY
				Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan RKPD yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah 1 dokumen 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan KUA PPAS yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah. 1 dokumen	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen sinkronisasi Perencanaan (RKPD dan KUA PPAS) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan Keselarasan dengan RPJMD) sebanyak 2 dokumen	336.200	Tersusunnya dokumen sinkronisasi Perencanaan (RKPD dan KUA PPAS) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan Keselarasan dengan RPJMD) sebanyak 2 dokumen	369.820	Tersusunnya dokumen sinkronisasi Perencanaan (RKPD dan KUA PPAS) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan Keselarasan dengan RPJMD) sebanyak 2 dokumen	406.802	Tersusunnya dokumen sinkronisasi Perencanaan (RKPD dan KUA PPAS) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan Keselarasan dengan RPJMD) sebanyak 2 dokumen	447.482	Tersusunnya dokumen sinkronisasi Perencanaan (RKPD dan KUA PPAS) sesuai ketentuan berlaku (ketepatan waktu dan Keselarasan dengan RPJMD) sebanyak 2 dokumen	1.560.304	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 100% tepat waktu	N/A	Tersusunnya dokumen rancangan akhir RPJMD 100% tepat waktu	677.945	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen rancangan akhir RPJMD 100% tepat waktu	677.945	BAPPEDA DIY
			23	Program Perencanaan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	89,35%	89,74%	1.643.452	89,87%	1.375.000	91,14%	1.550.000	92,41%	1.805.000	93,67%	2.200.000	93,67%	8.618.452,5	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggun- gi- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembangunan Sosial Budaya																
			050	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor SDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang SDM sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang SDM sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	172.960	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang SDM sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	172.960	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	190.256	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	209.282	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	230.210	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	253.231	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	882.979	BAPPEDA DIY	DIY
			051	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	715.135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	715.135	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	473.350	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	558.185	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	714.004	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	999.904	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	2.745.443	BAPPEDA DIY	DIY
			052	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Budaya sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-	104.149	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	104.149		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggun- gi- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu													
			053	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun n+1 Dokumen Evaluasi RAD SDGs DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan untuk mencapai target RAD SDGs DIY Tahun n+1 Dokumen profil kemiskinan kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	651.208	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Kesra sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	651.208	BAPPEDA DIY	DIY
				Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	1. Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi CSR/TSLP, 1 dokumen 3. Dokumen monev RAD TPB DIY , 1 dokumen 4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	711.394	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	782.533	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	860.787	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	946.865	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	3.301.579	BAPPEDA DIY	DIY
			22	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	81,30%	83,72%	825.964	84,78%	750.760,4	86,96%	950.000	89,13%	1.109.858	91,30%	1.270.843	91,30%	4.907.425,4	BAPPEDA DIY	DIY
			065	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2.Dokumen Hasil Monev Sektor pertanian dan kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	191.165	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang pertanian dan kelautan Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	191.165	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Kajian Masterplan Agriculture 1 dokumen	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen Tersusunnya kajian sebagai pedoman pengembangan kawasan pertanian dan	210.328,4	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	355.524,8	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	455.935,3	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	551.528,0	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.573.316,5	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggun- g- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					5. Kajian Masterplan Aquaculture 1 dokumen				pedoman pengembangan kelautan dan perikanan kawasan pesisir											
			066	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	596.719	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	596.719	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2, 1 dokumen 4. Updating aplikasi potensi usaha, 1 aplikasi	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk menjamin kesesuaian antara potensi ekonomi dengan rencana kegiatan mitra subbid dunia usaha sebanyak 1aplikasi	500.000,0	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	550.000,0	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	605.000,0	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	665.500,0	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	2.320.500	BAPPEDA DIY	DIY
			067	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	38.080	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	38.080	BAPPEDA DIY	DIY
				Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 100% tepat waktu	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya hasil monev RAD Pangan dan Gizi sebagai Bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	40.432,0	Tersusunnya hasil monev RAD Pangan dan Gizi sebagai Bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	44.475,2	Tersusunnya hasil monev RAD Pangan dan Gizi sebagai Bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	48.922,7	Tersusunnya hasil monev RAD Pangan dan Gizi sebagai Bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	53.815,0	Tersusunnya hasil monev RAD Pangan dan Gizi sebagai Bahan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	187.644,9	BAPPEDA DIY	DIY
																				DIY
			27	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	88,72 %	90,14%	938.105	90,50%	710.015,5	91%	1.135.107	91,55%	1.248.617,7	92,96%	1.373.479,5	92,96%	5.405.325,8	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggun- gung- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			009	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	704.377	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	704.377	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	460.015,5	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	860.107	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	946.118	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.040.730	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	3.306.970,5	BAPPEDA DIY	DIY
			010	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	233.727	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	233.727	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	250.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	275.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	302.500	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	332.750	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.160.250	BAPPEDA DIY	DIY
			23	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	76,42%	77,14%	1.405.493	80,00%	856.030,20	82,86%	1.250.000	85,71%	1.500.000	88,57%	1.750.000	88,57%	6.761.523,90	BAPPEDA DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggun- gi- awab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7	Penataan Ruang Daerah	Dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan BKPRD DIY (2 dokumen) Dokumen rekomendasi kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang (1 dokumen)	Tersedianya bahan acuan penataan ruang daerah 100% tepat waktu	Tersedianya bahan acuan penataan ruang daerah 100% tepat waktu	371.384		-		-		-		-	Tersedianya bahan acuan penataan ruang daerah 100% tepat waktu	371.384	BAPPEDA DIY	DIY
			10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor PTP dan ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018(1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang PTP dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang PTP dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	710.147		-	-	-	-	-	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang PTP dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	710.147	BAPPEDA DIY		
			14	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra SubbidangPerhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2, 1 dokumen	-	-	-	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	250.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	425.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	592.500	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	751.750	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang PIW dan ESDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	0,099421296	BAPPEDA DIY	DIY
			11	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor SDA dan LH (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018 (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang SDA dan LH Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang SDA dan LH Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	191.208		-	-	-	-	-	-	2 Dok	191.208	BAPPEDA DIY	DIY	
			12	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n sebanyak 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2 sebanyak 1 dokumen	-	-	-	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	460.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	664.367	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	730.804	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	803.884	8 Dok	2.659.055	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggunj-awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			13	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD Gas Rumah Kaca	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (1 dokumen)	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	132.755	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	146.030	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	160.633	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	176.696	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	194.366	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 100% tepat waktu	810.482	BAPPEDA DIY	DIY
			28	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	87%	88%	2.196.608	89%	1.859.000	90%	2.200.000	91%	2.450.000	92%	2.695.000	92%	11.400.608	BAPPEDA DIY	DIY
					Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			17	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Laporan penilaian capaian kinerja untuk PA/KPA TW IV/ Tahun n-1dan TW I-III/ Tahun n (340 buku) 2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun n+1 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 (120 buku) 3. Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80 buku), RPJMD DIY s.d. Tahun n-1 (80 buku), RKPD DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. Tahun n-1 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th. Tahun n-1 (25 buku), RKPD Kab/Kota th.n (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 4. Penambahan fitur dan menu rekap pada e Monev APBN, Penambahan fitur evaluasi untuk perencanaan dan penyusunan urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistem E Monev APBD, & Pengembangan aplikasi evaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi) 5. Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester 1 dan semester 2 tahun n	1. Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu 2. Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah tahun n+2 3. 7 laporan hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan atau pelaksanaan pembangunan. 4. Tiga aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel. 5. Laporan hasil evaluasi mendukung keberhasilan pelaksanaan dan perencanaan yang lebih baik.	1. Pelaksanaan Pembangunan daerah tepat waktu sesuai target dan berkualitas 2. Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 . 3. 6 Dokumen hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan / pelaksanaan pembangunan. 4. Dua aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel. 5. Hasil evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan dan perencanaan yang lebih baik.	1.574.031										1.574.031	BAPPEDA DIY	
					1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen dan TWI-III/ Tahun n sebanyak 3 dokumen 2. Laporan evaluasi: -hasil RPJMD DIY s.d Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen , -Hasil RKPD DIY sebanyak 1 dokumen , - Hasil Renstra OPD DIY s.d. Tahun n-1, sebanyak 1 dokumen,					1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik	1.397.693	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik	1.692.562	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik	1.891.819	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik	2.081.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik	7.063.074	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggun- gi- awab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun				
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					-Hasil Renja OPD DIY sebanyak 1 dokumen, -Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun n-1, sebanyak 1 dokumen, -Hasil RKPD Kab/Kota sebanyak 1 dokumen, -Hasil Program Pemda sebanyak 1 dokumen -Kebijakan RKPD 1 dokumen - Evaluasi Hasil RPJPD DIY sebanyak 1 Dokumen 3. Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN, sebanyak 2 aplikasi"				perencanaan/pelaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi"		evaluasi yang akuntabel sebanyak 9 dokumen 3.Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi				
			18	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun n-1 sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 (150 eks) dan dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Tahun 2012-2017 sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 (150 eks) 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun n-1 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130 eks) 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun n sesuai dengan Permenpan 53/2014 (60 eks) 4. Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV (Tahun n-1) dan TW I-III (Tahun n) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks) 5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks) 6. Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun n-1) dan TW I-III (Tahun n) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks) 7. Buku Best Practice menuju Akuntabilitas (150 eks)	1. Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu. 2. Penghantaran LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 3. Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 4. Tersampainya hasil monitoring dan evaluasi PK per triwulan tepat waktu. 5. Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Kab/1Kota Tahun 2016 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota. 6. Tersampainya laporan kinerja APBN ke pusat tepat waktu 7. Best Practice menuju akuntabilitas sebagai panduan akuntabilitas.	1. Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu. 2. Penghantaran LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 3. Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 4. Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu. 5. Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Kab/1Kota Tahun 2017 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota. 6. Tersampainya laporan kinerja APBN	622.577										622.577	BAPPEDA DIY		

BAB 7

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAPPEDA DIY memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No 51 Tahun 2015, tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA DIY mempunyai fungsi dari perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan, hingga penyelenggaraan pengendalian program pembangunan.

Di sisi lain, BAPPEDA DIY masih menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan perencanaan. Sementara selama ini masih terdapat kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan pencapaiannya.

Merujuk pada hal tersebut, maka dalam rangka mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ditetapkan indikator kinerja utama BAPPEDA DIY adalah persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1 berikut:

Tabel 7-1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	85,50%

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah dihitung dari jumlah indikator sasaran OPD tahun N yang tercapai dibagi total jumlah indikator sasaran OPD di RPJMD dikalikan 100%. Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja pada tahun 2016 sebesar 83% dan ditargetkan untuk mencapai 85,50% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa diharapkan kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan akan semakin menyempit dari tahun ke tahun.

BAB 8

PENUTUP

Renstra BAPPEDA DIY tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BAPPEDA DIY. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra BAPPEDA DIY termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Renstra BAPPEDA DIY tahun 2017-2022 merupakan acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan BAPPEDA DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.